

Dewan Sebut Anggaran Bansos Kecil



Sumber gambar : https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240702_Walikota-Bontang-Basri-Rase.jpg

BONTANG, TRIBUN - Wali Kota Bontang Basri Rase angkat bicara soal kecilnya anggaran bantuan sosial tahun ini. Pemerintah sebelumnya mendapat kritik dalam rapat paripurna dari Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang.

Ia mengungkapkan Pemerintah pelit terhadap masyarakat miskin. Padahal APBD Bontang 2023 tembus Rp2,53 triliun. Sementara duit untuk bantuan pengentasan kemiskinan hanya Rp1,6 miliar.

Bakhtiar menjelaskan berdasarkan data-data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Bontang sebanyak 7.710 orang. Jika dihitung rata-ratanya dengan jumlah Rukun Tetangga sejumlah 499, maka ada 14 orang miskin di setiap RT. "Kalau anggaran itu dibagi rata, setiap penduduk miskin hanya kebagian bantuan sosial Rp216.601 per tahun atau 100 ribuan per enam bulan," kata Bakhtiar.

DPRD mendorong Pemkot Bontang mengambil kebijakan populer. Dengan APBD mencapai Rp2,53 triliun, alokasi anggaran bantuan sosial harusnya dapat ditingkatkan. "Ke depannya mesti naik. APBD Bontang ini banyak, Rp2,5 triliun. Tapi pembiayaan Bansos cuma Rp1,6 miliar. Harusnya lebih besar," kata Bakhtiar Wakkang.

"Tugas kita untuk menyentuh pemberdayaan warga miskin, dalam bentuk program. Atau alokasi belanja bantuan sosial ini lebih mengena," tegasnya.

Basri Rase yang ditemui se usai menghadiri acara di Kodim 0908 Kota Bontang, Selasa (2/7/2024) mengatakan, pemerintah bukan tidak mau menambah dana bantuan sosial di tahun ini.

Namun langkah tersebut mesti mengikuti aturan yang ada. Terkait mekanisme Bansos dimana mesti disesuaikan dengan jumlah penerima, dan persentase APBD.

Di sisi lain, Basri mengaku juga mempertimbangkan himbauan Kementerian Dalam Negeri atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPKⁱ), agar tidak menggelontorkan Bansos menjelang Pilkada.

"Kan ada arahan dari pusat, anggaran seperti itu rawan dimanfaatkan jelang Pilkada. Sebaiknya (anggaran Bansos) jangan terlalu tinggi," tuturnya. Meski demikian, Basri mengaku tetap meminta bawahannya untuk mengkaji ulang potensi penambahan anggaran Bansos tersebut. **(mrd)**

Sumber berita:

1. Kaltim.tribunnews.com, Dikritik Anggaran Bansos Kecil di Bontang, Basri Rase Sebut Ada Himbauan Kementerian Dalam Negeri, 02/07/24
2. Tribun Kaltim, Dewan Sebut Anggaran Bansos Kecil, 03/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Walikota Bontang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perwali Bontang 6/2018) diatur secara khusus mengenai pemberian Bantuan Sosial, yaitu:

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, kesehatan, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga kelompok, dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Perwali Bontang 6/2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

ⁱ Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.